

Praperadilan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditolak Hakim

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (pn) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang disebut merugikan negara Rp 2,1 triliun.

"Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim tunggal, Tumpunuli Marbun saat membacakan putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis, (2/11).

Hakim Tumpunuli mengatakan bukti-bukti yang dimiliki Karen dalam mengajukan praperadilan dinilai lemah. Sedangkan hakim menilai bukti-bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjerat Karen dinilai sangat kuat dan meyakinkan.

Selain itu, hakim mengatakan, dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG),

telah terjadi kerugian keuangan negara.

"Dalam pokok perkara, pertama menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima untuk seluruhnya, kedua membekukan biaya perkara terhadap pemohon sejumlah nihil," imbuhnya.

Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait pembelian LNG. KPK menjerat Karen dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga perbuatan Karen mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,1 triliun. Karen juga telah ditahan oleh KPK sejak Selasa (19/9).

"Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD 140 juta yang ekuivalen dengan Rp 2,1 triliun," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers. ● me

Situs Kemhan Diduga Diretas, Brigjen Edwin: Sedang Kami Dalam

JAKARTA (IM) - Website resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang diduga diretas ramai di aplikasi X. Berdasar akun yang fokus pada laporan keamanan siber @stealthmole_int, terlihat bukti tangkapan layar yang memperlihatkan bahwa peretas mengklaim telah membobol situs Kemhan.

Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami kebenaran informasi yang tersebar di media sosial itu.

"Kami sedang mendalami informasi tersebut melalui sater terkait, perkembangan informasi akan kami update yah Mbak," kata Edwin kepada wartawan, Kamis (2/11).

Edwin menegaskan bahwa saat ini sebenarnya tidak ada kendala yang terjadi pada situs resmi Kemhan.

"Untuk Website tidak ada kendala, namun Sater yang menanggapi hal ini sedang melaksanakan pemeriksaan terkait informasi tersebut,"

ucapnya.

Hingga berita ini dimuat, belum terkonfirmasi apakah ada kebocoran data yang dialami Kemhan atau tidak. Sebab, peretas mengklaim telah mengantongi dokumen rahasia dan sensitif. Bahkan, peretas mengaku akan menjualnya di pasar gelap.

"Muncul peretas yang mengaku menjual akses ke Kementerian Pertahanan Indonesia. Seorang peretas mengaku telah berhasil meretas Kementerian Pertahanan Indonesia dan memposting pesan di pasar gelap, menawarkan untuk menjual dokumen rahasia dan sensitif situs web tersebut, serta akses admin," tulis akun @stealthmole_int, Rabu 1 November 2023.

"Sebagai buktinya, peretas membagikan tangkapan layar dan menegaskan bahwa server tersebut berisi sekitar 1,64TB data. Analisis tangkapan layar tidak menutup kemungkinan bahwa peretas mengakses situs web tersebut," katanya. ● me

Kejagung Periksa Anggota BPK Achsanul Qosasi Hari Ini

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Achsanul Qosasi.

Izin Jokowi sudah diterima pada Selasa (31/10). Rencananya penyidik Kejagung akan memeriksa Achsanul Qosasi pada hari ini, Jumat (3/11). Ia diperiksa terkait kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

"Izin Presiden sudah kami terima hari Selasa kemarin," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (2/11).

Ketut mengatakan Achsanul akan diperiksa sebagai saksi. Kendati demikian, menurut Ketut, belum ada konfirmasi apakah Achsanul akan hadir atau tidak pada pemeriksaan tersebut.

"Akan dijadwalkan pemeriksaan berdasarkan pemanggilan penyidik hari Jumat tanggal 3 November jam 09.00 WIB," kata Ketut.

Nama Achsanul Qosasi (AQ) disebut-sebut dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek BTS 4G. Achsanul mengaku siap memberikan

keterangan kepada Kejagung.

"Terkait dengan beredarnya informasi bahwa saya akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk dimintai klarifikasi mengenai BTS Kominfo, saya siap hadir sesuai dengan prosedur," kata Achsanul saat dihubungi, Selasa (31/10) lalu.

Nama Achsanul muncul dalam sidang lanjutan korupsi proyek BTS saat Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak diperiksa sebagai terdakwa. Achsanul mengaku memang pernah melakukan audit terkait proyek BTS 4G.

"Terkait dengan fakta persidangan di mana ada yang menyebutkan chat WA di antara mereka yang menyebut inisial nama saya, saya bisa sampaikan bahwa memang yang memeriksa dan mengaudit proyek tersebut adalah saya selaku AKN III BPK RI. Audit sudah selesai dilakukan secara profesional dan akuntabel dan kami bersama penyidik kejaksaan sudah melakukan eksepsi di kantor BPK," katanya.

Dia menambahkan, kasus korupsi BTS 4G pun berawal dari hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK. "Saya berkomitmen untuk selalu konsisten dalam membantu penegakan hukum. Selama ini kami sudah sering membantu APH (aparatus penegak hukum) dalam penyelesaian kasus hukum. Kasus ini justru bermula dari temuan BPK," katanya. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG LAPANGAN TIPIKOR RUMAH SAKIT ARUN LHOXSEUMAW

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh R Hendral (kanan) memeriksa komputer layanan pendaftaran pasien saat sidang lapangan dugaan tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Aceh, Kamis (2/11). Sidang lapangan tersebut untuk menggali alat bukti, keterangan saksi, saksi ahli dan keyakinan hakim terkait dugaan korupsi peryalahgunaan keuangan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dengan kerugian negara mencapai Rp44,9 miliar dengan terdakwa masing-masing mantan Direktur PT RS Arun Hariadi dan mantan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya.

Pemeriksaan Etik Hakim Konstitusi oleh MKMK Tak Berpengaruh Langsung ke Pencalonan Gibran

Putusan MK bersifat final and binding, maka Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya mungkin diubah melalui putusan MK juga.

JAKARTA (IM) - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak bisa mengubah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sebab MKMK tak berwenang mencabut putusan MK yang kontroversial tersebut. Oleh karenanya, apa pun putusan MKMK kelak, tak akan menghentikan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berkontestasi sebagai bakal cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Secara prinsip sebenarnya putusan MKMK itu apa pun keputusannya tidak akan berpengaruh langsung pada pencalonan Gibran," kata

Bivitri dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (2/11).

Bivitri menjelaskan, MKMK hanya berwenang menyelidiki dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Nantinya, MKMK akan menyatakan ada atau tidaknya benturan kepentingan para hakim dalam putusan tersebut.

Jika ada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik, MKMK dapat menerbitkan rekomendasi pemecatan. "MKMK wewenang terbatas pada etik dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik," terang Bivitri.

Oleh karena putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat, maka Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya mungkin

diubah melalui putusan MK juga.

Saat ini, sudah ada sejumlah uji materi terkait syarat usia capres-cawapres yang bergulir di MK. Sama seperti perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, uji materi ini juga menyoal Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan MKMK kelak dapat dijadikan landasan dalam proses uji materi baru. Seandainya MKMK menyatakan ada hakim yang terbukti memiliki kepentingan pribadi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan tidak mungkin uji materi baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu membatalkan putusan MK sebelumnya.

"Jadi terhadap putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu yang bisa dilakukan adalah MK memeriksa lagi berdasarkan permohonan yang sudah ada," kata Bivitri.

"Untungnya kita sudah punya tiga permohonan lagi yang menguji pasal yang kita persoalkan ini (Pasal 169 huruf q UU Pemilu), jadi

bisa masuk melalui jalur itu, karena logika hukumnya bisa masuk," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga kini MK telah menerima secara resmi 20 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Aduan tersebut bervariasi. Ada yang melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman dari Gibran Rakabuming Raka dan memintanya mengundurkan diri.

Ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), ada pula aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.

MKMK menyatakan bakal membacakan putusan terkait aduan ini paling lambat pada 7 November 2023, sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 pengganti ke Komisi Pemili-

han Umum (KPU) RI.

Diketahui, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat soal uji materi syarat usia capres-cawapres yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas uji materi itu, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Berkat putusan MK tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres.

Putusan ini kontroversial lantaran diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pasca-putusan MK tersebut, muncul tuduhan soal dinasti politik, bahkan nepotisme. ● han

Semakin Brutal, 20 Orang KKB Papua Serang Nakes, Lima Orang Luka-luka

YAHUKIMO (IM) - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Papua kian brutal, Baru-baru ini mereka menyerang sejumlah tenaga kesehatan, dari tim cadangan kesehatan kesehatan (TCK) Emergency Medical Regional Papua di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Memang benar lima orang nakes yang diterjunkan ke Distrik Amuma untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Selasa (31/10) diserang KKB," ujar Kasatgas Humas Damai Cartenz, Bayu Suseno, kepada wartawan, dikutip, Kamis (2/11).

Menurut informasi yang didapat, sekitar 20 orang KKB menyerang kelima nakes tersebut. Para KKB itu dilaporkan membawa senjata api laras panjang dan senpi laras pendek, serta senjata tradisional seperti panah juga senjata tajam. Kelima mengalami luka-luka yakni Danur Widura (39) merupakan Ketua Tim Crisis Center regional Papua. Ia mengalami luka lebam pada wajah sebelah kiri dan kanan. Lalu punggung belakang serta luka di rusuk sebelah kiri.

Angganita Mandowen (41) merupakan Koordinator Tim Crisis Center Regional Papua mengalami luka lebam

pada mata kiri dan kanan. Korban lainnya, Sandy Ransar (23), mengalami luka lebam di pipi sebelah kiri.

Ferdinandus Suweni (33 th) anggota nakes lainnya, mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri, belakang telinga sebelah kanan dan luka lebam di rusuk sebelah kanan. Selanjutnya, Adrianus Edwardus Harapan (32 th) anggota mengalami luka robek pada tangan kiri dan ibu jari tangan kiri, luka lebam di punggung belakang. Termasuk wajah bagian kanan dan luka robek di bibir bawah.

Seluruh korban saat ini telah dibawa ke Jayapura untuk diberi perawatan."Saat ini telah di evakuasi ke Jayapura. Kita harapkan bisa cepat pulih," tutup Bayu. ● me

Prabowo Sebut Kasus Rempang Dicampuri Intelijen Asing seperti di Papua

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menegaskan, konflik di Pulau Rempang, Batam, dicampuri oleh pihak intelijen luar negeri. Hal itu diungkapkan Prabowo saat membuka "Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia" di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Prabowo menyebut Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki kekayaan mineral.

"Sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia," kata Prabowo di

hadapan para menteri dan pimpinan TNI yang hadir di acara tersebut.

Prabowo mengatakan, berdasarkan sumber-sumber yang ia peroleh, konflik-konflik di Indonesia dicampuri intelijen asing. Contohnya, konflik di Rempang, Aceh, Ambon, dan Papua.

"Peristiwa-peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel-intel asing," katanya.

"Dan kita banyak juga mengalami di Aceh, di Ambon kita mengalami, di Timor-Timur, dan kita mengalami di Papua terus-menerus, bagaimana campur tangan asing san-

gat mempengaruhi kondisi kita," tutur eks Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad itu.

Calon presiden dari Kotalis Indonesia Maju (KIM) ini, menjelaskan, perkembangan geopolitik dan geostrategis dunia yang cepat berpengaruh pada banyak negara dunia, termasuk Indonesia.

"Ini saya pandang perlu, karena perkembangan dinamika geopolitik berkembang begitu cepat. Pengaruh di satu wilayah dunia yang kelihatannya jauh dari kita, di era sekarang pengaruhnya luar biasa pada seluruh dunia," kata Prabowo. ● me

FOTO: ANTARA



PEMERIKSAAN LANJUTAN MANTAN MENTAN

Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo berada di dalam mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/11). Mantan Mentan tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

PENGUMUMAN RUPSLB
PT. MODERN MULTI KEMASINDO Berkedudukan di Bitung - Tangerang
Mohon kehadirannya bagi Para Pemegang Saham PT. Modern Multi Kemasindo, berkedudukan di Tangerang pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 7 November 2023
Waktu : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Jl. Raya Serang Km 10 No. 2 RT.003/RW.003 Desa Kadu Jaya, Kec. Curug Bitung - Tangerang

Agenda :
Pemberhentian direksi dan pengangkatan direksi baru
Terima kasih atas perhatiannya

Tangerang, 1 November 2023
Ttd Direksi

PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM
Bahwa telah ditandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham perseroan terbatas PT TUGU OLAH PRIMA, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Isi Keputusan diantaranya menyekujui pengalihan/penjualan seluruh saham perseroan PT TUGU OLAH PRIMA kepada Pihak Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan silahkan menghubungi Direksi perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Alamat : Jalan Karang Tengah Raya No.11 B, RT 006, RW 004, Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta, 3 November 2023
Direksi
tdt
UMAR SAPUTRA
Direktur Utama

PENGUMUMAN
Bahwa berdasarkan Akta Tanggal 05 Juli 2023 Nomor : 05 dibuat di hadapan KRITANTI SURYANI, S.H.,MKn, Notaris Kota Jakarta Pusat, telah didirikan PT. MANNA ANUGERAH INTERNASIONAL, berkedudukan di Kota Semarang, dengan telah memasukan (inbreng) aktiva dan pasiva dari seluruh kekayaan termasuk juga segala hak dan izin-izin yang dimiliki oleh CV. MANNA ANUGERAH SEJAHTERA, berkedudukan di Kota Semarang bila ada pihak atau masyarakat yang keberatan ataupun adanya sanggahan atau pemasukan CV. MANNA ANUGERAH SEJAHTERA tersebut dapat mengajukan sanggahan atau keberatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini yang ditujukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, DIRJEN AHU, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007.